

Judul : Lembaga antirasuah berpotensi kian melemah
Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : ?

Lembaga Antirasuah Berpotensi kian Melemah

KALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai 10 nama calon pimpinan (capim) dan 10 calon anggota Dewan Pegawai (Dewas) KPK yang diloloskan Panitia Seleksi (Pansei) KPK 2024 jauh dari mimpi pemberantasan korupsi.

Nama-nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo itu nantinya akan menjalani *fit and proper test* di hadapan Komisi III DPR. Namun, dengan nama-nama pilihan panasel yang dianggap memiliki rekam jejak buruk itu, koalisi menilai Presiden akan menjadikan ajang itu sebagai instrumen politik.

"Dengan keluarnya 10 nama (capim) ini, jelas terbukti panasel tidak mengerti akar persoalan KPK hari ini. Masalah fundamental seperti kapasitas, integritas, independensi politik, dan rekam jejak tidak boleh ada cacat sedikit pun," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

"Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan," sambungnya.

Selain capim KPK, Alvin menuturkan calon anggota Dewas KPK yang lolos di 10 besar juga menjadi bagian dari skenario buruk untuk melemahkan lembaga antirasuah yang sejatinya sudah lemah. "Selain nirlintegritas, ada calon dewas rekam jejaknya memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu yang berpotensi pada konflik kepentingan," tuturnya.

Senada dengannya, pengajar STH Indonesia Jember, Asfinawati, mengatakan 10 nama capim KPK yang disetorkan panasel masih menerapkan logika keterwakilan unsur aparat penegak hukum. Ia pun khawatir capim dari aparat penegak hukum akan melahirkan konflik kepentingan di tubuh KPK.

Pasalnya, boleh jadi ke depan ada kasus korupsi yang melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan. Potensi loyalitas ganda dari pimpinan dengan latar belakang penegak hukum pun rawan terbentuk.

"Misalnya (polisi) duduk sebagai perwakilan (pimpinan KPK), tidak ada independensi

karena UU Polri menyatakan polisi itu satu kesatuan dan tunduk pada Kapolri," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menandatangani nama-nama capim dan calon anggota Dewas KPK setelah urusan administrasi di Kementerian Sekretariat Negara selesai. "Menunggu selesai administrasi dari Setneg. Kalau selesai, nanti dithawa ke saya, (saya) tanda tangan itu," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kemarin. (Fik/Ant/X 3)